

Arahan Pengembangan Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Kota Surabaya (Studi Kasus Koridor Mayjend Sungkono)

Sri Nurkhalishah Rachmi Dewi dan Ardy Maulidy Navastara

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

e-mail: ardy.navastara@urplan.its.ac.id

Abstrak—Keadilan spasial dalam suatu kota dapat diwujudkan dengan melakukan penyediaan akses terhadap infrastruktur yang bersifat universal salah satunya infrastruktur jalur pejalan kaki. Kota Surabaya merupakan kota dengan tingkat perkembangan jalur pejalan kaki yang sangat pesat namun pada kenyataannya belum mampu mendukung seluruh lapisan masyarakat meliputi masyarakat rentan penyandang disabilitas salah satunya pada Koridor Mayjend Sungkono. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memberikan arahan pengembangan jalur pejalan kaki ramah disabilitas di Kota Surabaya dengan studi kasus pada Koridor Mayjend Sungkono. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei primer melalui observasi, penyebaran kuesioner kepada 60 penyandang disabilitas dan wawancara kepada pakar sedangkan survei sekunder dilakukan melalui studi literatur. Dengan analisis AHP berdasar hasil kuisisioner, didapatkan ranking prioritas variabel pengembangan jalur pejalan kaki ramah disabilitas yaitu, 1) Ukuran Dasar Ruang, 2) Konflik Pejalan Kaki, 3) Tekstur dan Permukaan, 4) Kebersihan, 5) Jalur Pemandu, 6) Convenience, 7) Ramp, 8) Gaya Alam dan Iklim, 9) Partisipasi Masyarakat, 10) Keindahan, 11) Penerangan Jalan, 12) Tangga, 13) Tingkat Kebisingan, 14) Vegetasi dan 15) Resting Area. Dengan pendekatan triangulasi, didapatkan beberapa arahan utama pengembangan jalur pejalan kaki ramah disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono yaitu pelebaran jalur pejalan kaki menjadi minimal 2 meter, penyediaan bollard sesuai dimensi khususnya bagi pengguna kursi roda dan penggantian material jalur pejalan kaki menjadi beton atau paving.

Kata Kunci—Kota Surabaya, Arahan Pengembangan, Jalur Pejalan Kaki, Penyandang Disabilitas.

I. PENDAHULUAN

PERANCANGAN ruang kota seharusnya mampu melayani kepentingan publik yang di dalamnya terdapat berbagai lapisan masyarakat dengan perilaku yang beragam sehingga mampu mewujudkan keadilan didalamnya [1]. Salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan spasial adalah dengan melakukan penyediaan akses terhadap infrastruktur yang bersifat universal [2]. Namun pada kenyataannya, masyarakat rentan di Indonesia termasuk penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi baik dalam kehidupan sosial maupun dalam mengakses pelayanan dan fasilitas publik [3].

Sebagai bentuk komitmen dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Indonesia melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan penerbitan peraturan yang secara khusus mengatur tentang disabilitas yakni Undang-

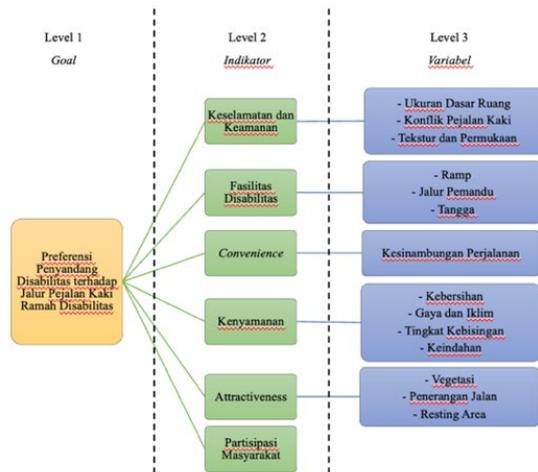
Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Fasilitas publik paling sederhana dalam menunjang aksesibilitas adalah jalur pejalan kaki.

Kriteria jalur pejalan kaki yang ideal berdasarkan berbagai pertimbangan terutama kepekaan pejalan kaki yaitu salah satunya adalah mengharuskan jalur pejalan kaki untuk dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik antara lain menggunakan perencanaan dan desain universal [4]. Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas pasal 101 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

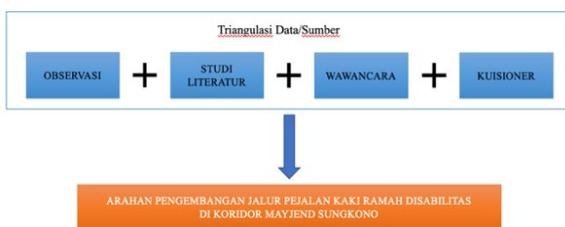
Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia dengan tingkat perkembangan jalur pejalan kaki yang sangat pesat, dimana dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dengan fokus penyediaan prasarana pejalan kaki yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus dan sejalan dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan fungsional kota dengan mendorong peran peran swasta dan masyarakat. Namun, ketersediaan jalur pejalan kaki di Surabaya belum memenuhi standar bagi penyandang disabilitas [5].

Berdasarkan RDTRK UP VIII Dukuh Pakis dan RDTRK UP VII Wonokromo, Kawasan Koridor Mayjend Sungkono merupakan salah satu prioritas pengembangan jalur pejalan kaki dimana Koridor Mayjend Sungkono memerlukan adanya pengaturan akses jalan dan pengembangan RTH meliputi median jalan dan jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki di Kawasan koridor Mayjend Sungkono selain sebagai penambah ruang terbuka hijau dapat pula menjadi pembantu pemenuhan kebutuhan aksesibilitas bagi masyarakat secara umum maupun khusus.

Pada kondisi eksistingnya, jalur pejalan kaki di Koridor Mayjend Sungkono masih belum memiliki konektivitas yang baik, masih kurang sedap dipandang mata karena kualitas bahan yang rendah sehingga jalur pejalan kaki mudah rusak dan pecah, masih terjadi konflik antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, serta belum dapat mengatasi permasalahan banjir. Selain itu, beberapa titik jalur pejalan kaki belum dapat mengakomodir masyarakat penyandang disabilitas. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut diperlukan sebuah kajian mengenai arahan pengembangan jalur pejalan kaki yang ramah disabilitas yang sesuai dengan preferensi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menikmati dan memanfaatkan haknya secara optimal.



Gambar 1. Struktur Hirarki Penelitian dalam Analisis AHP.



Gambar 2. Skema Pendekatan Triangulasi.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik menekankan pada pemahaman secara menyeluruh serta argumentasi yang didukung oleh data empiris yang relevan sebagai tolok ukur dalam menarik kesimpulan [6]. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian campuran atau *mixed-methods*.

B. Indikator dan Variabel Penelitian

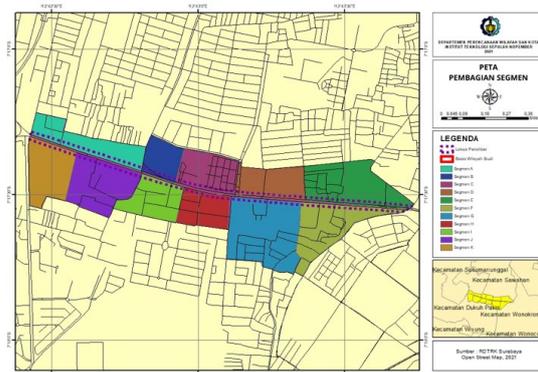
Indikator dan variabel yang dirumuskan oleh peneliti merupakan sintesis dari kriteria jalur pejalan kaki umum dan khusus penyandang disabilitas serta berbagai penelitian terdahulu. Didapatkan 6 indikator utama yakni keselamatan dan keamanan, fasilitas disabilitas, *convenience*, kenyamanan, *attractiveness*, dan partisipasi masyarakat.

C. Mengidentifikasi Karakteristik Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Koridor Mayjend Sungkono

Tahapan ini dilakukan dengan observasi melalui survei primer dan sekunder melalui studi literatur mengenai variabel partisipasi masyarakat.

D. Mengidentifikasi Preferensi Penyandang Disabilitas Terhadap Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas

Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman, dan intuisi [7]. Metode ini dilakukan dengan bantuan software analisis yaitu software *Expert Choice*. Secara khusus, identifikasi preferensi ini difokuskan pada penyandang disabilitas sebagai responden. Struktur hirarki dengan AHP ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 3. Peta Pembagian Segmen.

Tabel 1. Identifikasi Karakteristik Indikator Keselamatan dan Keamanan

Segmen	Ukuran Dasar		Tekstur dan Permukaan	Konflik Kendaraan
	Lebar	Tinggi		
Segmen A	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, belum optimal
Segmen B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak tersedia bollard
Segmen C	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, sudah optimal
Segmen D	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, belum optimal
Segmen E	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, sudah optimal
Segmen F	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, belum optimal
Segmen G	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, sudah optimal
Segmen H	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, belum optimal
Segmen I	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, belum optimal
Segmen J	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, belum optimal
Segmen K	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tersedia bollard, belum optimal

E. Merumuskan Arahan Pengembangan Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono

Dalam penentuan arahan pengembangan jalur pejalan kaki ramah disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan triangulasi data dengan skema yang terdapat pada Gambar 2.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Gambaran Umum Wilayah

Penelitian ini mengambil studi kasus di kota Surabaya, tepatnya di Koridor Mayjend Sungkono dengan panjang 2,4 kilometer. Peneliti membagi lagi jalur pejalan kaki di koridor Mayjend Sungkono kedalam beberapa segmen yang lebih mikro guna memudahkan penelitian. Pembagian segmen ini didasarkan pada kecenderungan aktivitas yang ditunjukkan melalui Gambar 3.

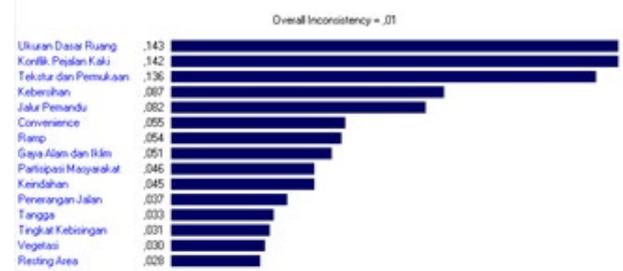
B. Identifikasi Karakteristik Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Koridor Mayjend Sungkono

1) Indikator Keselamatan dan Keamanan

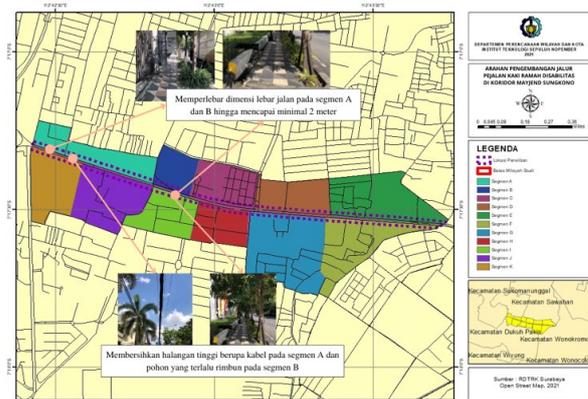
Perincian indikator ini terdapat pada Tabel 1.

Tabel 2.

Identifikasi Karakteristik Indikator Keselamatan dan Keamanan					
Segmen	Ramp	Jalur Pemandu			Tanda
		Guiding Block	Signage	APILL	
Segmen A	Ada, tidak sesuai	Ada, belum merata	Ada	-	-
Segmen B	Ada, tidak sesuai	-	Ada	-	-
Segmen C	Ada, tidak sesuai	-	Ada	Ada	-
Segmen D	Ada, tidak sesuai	Ada	Ada	Ada	-
Segmen E	Ada, tidak sesuai	Ada, belum merata	Ada	Ada	-
Segmen F	Ada, tidak sesuai	Ada, belum merata	Ada	Ada	-
Segmen G	Ada, tidak sesuai	-	Ada	Ada	-
Segmen H	Ada, tidak sesuai	Ada, belum merata	Ada	-	-
Segmen I	Ada, tidak sesuai	Ada	Ada	Ada	-
Segmen J	Ada, tidak sesuai	Ada, belum merata	Ada	-	-
Segmen K	Ada, tidak sesuai	-	Ada	-	-



Gambar 4. Hasil Pembobotan Keseluruhan Variabel Preferensi Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas.



Gambar 5. Arah Pengembangan Variabel Ukuran Dasar Ruang Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.

2) Indikator Fasilitas Disabilitas

Indikator fasilitas disabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

3) Indikator Convenience

Temuan di Koridor Mayjend Sungkono menunjukkan bahwa masih banyak aktivitas yang terjadi di jalur pejalan kaki seperti parkir pertokoan, pedagang kaki lima maupun usaha lainnya dimana aktivitas ini terjadi pada segmen A, E, F dan J. Selain itu, adanya tiang listrik dan gangguan kabel di tengah jalur pada segmen A, C dan G berpotensi mengurangi kelancaran berjalan kaki. Kerbs yang terlalu tinggi dan tutup saluran drainase yang tidak rata juga berpotensi mengganggu perjalanan.

4) Indikator Comfort

Tempat sampah dapat dikatakan minim dan juga masih terdapat sampah berserakan di segmen J. Selain itu, sudah tersedia saluran drainase yang juga dilengkapi dengan penutup, kecuali pada salah satu segmen yakni segmen D. Rata-rata temperatur di Koridor Mayjend Sungkono mencapai 29,1°C, sedangkan curah hujan rata-rata mencapai 499,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa Koridor Mayjend Sungkono memiliki kenyamanan yang kurang secara alami [8]. Berdasarkan perhitungan, rata-rata tingkat kebisingan di Koridor Mayjend Sungkono pada siang hari adalah 72,5 dB dan pada malam hari mencapai 73,4 dB dimana hal ini melebihi batas maksimum tingkat kebisingan [9]. Keindahan pada jalur pejalan kaki di Koridor Mayjend Sungkono diukur melalui keserasian warna, bentuk, dan elemen atau *street furniture*. Keserasian warna motif permukaan kurang serasi akibat motif yang banyak berganti/bertabrakan, kemudian lebar jalur pejalan kaki masih cukup bervariasi. Terakhir, pada *street furniture* meliputi bollard memiliki desain sederhana, tempat sampah, dan *resting area* yang bervariasi.

Selain itu juga bersih dari vandalisme serta adanya ilustrasi pada penutup saluran drainase.

5) Indikator Attractiveness

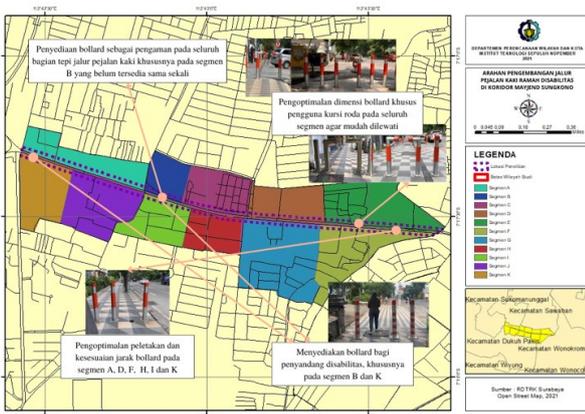
Lampu penerangan jalan tersedia dalam jarak antara 15-20 meter pada seluruh segmen, namun belum mampu menerangi setiap titik jalur pejalan kaki. Penerangan di jalur pejalan kaki juga dibantu oleh LED atau lampu toko dari segmen kawasan perdagangan dan jasa. Vegetasi pada jalur pejalan kaki di Koridor Mayjend Sungkono didominasi oleh pohon dan semak-semak. Vegetasi jenis pohon tersedia pada seluruh segmen meskipun belum cukup rimbun di beberapa titik seperti Segmen G. Sedangkan semak-semak hanya tersedia di Segmen A, C, E, dan G. *Resting area* pada jalur pejalan kaki di Koridor Mayjend Sungkono berbentuk bangku dan halte dan ketersediaannya sudah ada pada seluruh segmen di bagian selatan yakni segmen F hingga K dan pada bagian utara di segmen C dan D saja.

6) Indikator Partisipasi Masyarakat

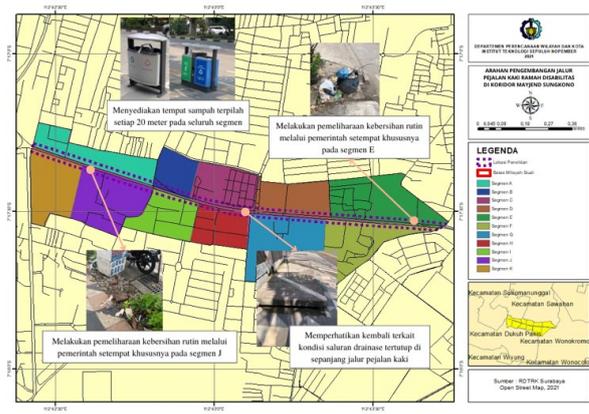
Berdasarkan data yang telah didapatkan, para pegiat dan aktivis disabilitas telah rutin memberikan masukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya terkait fasilitas bagi kalangan disabilitas. Secara khusus, pada perencanaan jalur pejalan kaki di Koridor Mayjend Sungkono belum melibatkan masyarakat penyandang disabilitas.

C. Identifikasi Preferensi Penyandang Disabilitas Terhadap Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas

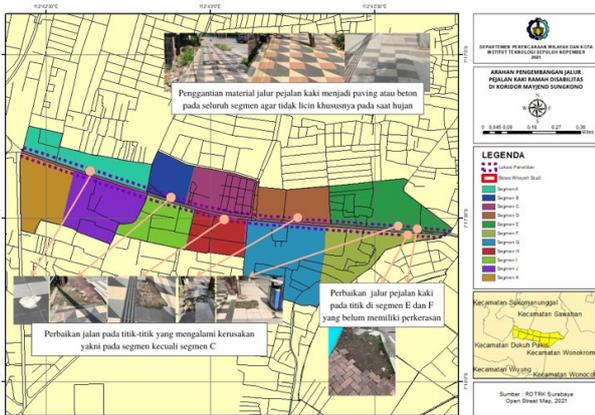
Hasil agregat pada analisis AHP didapatkan melalui perhitungan *mean* geometrik dari masing-masing skor evaluator [10]. Perhatikan hasil analisis pembobotan keseluruhan variabel pada Gambar 4.



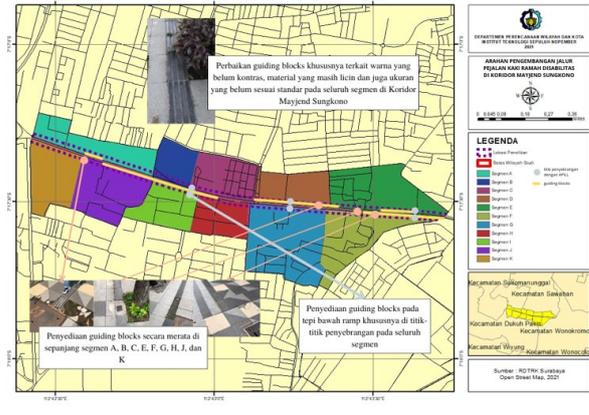
Gambar 6. Arahan Pengembangan Variabel Konflik Pejalan Kaki Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 8. Arahan Pengembangan Variabel Kebersihan Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 7. Arahan Pengembangan Variabel Tekstur dan Permukaan Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 9. Arahan Pengembangan Variabel Jalur Pemandu Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.

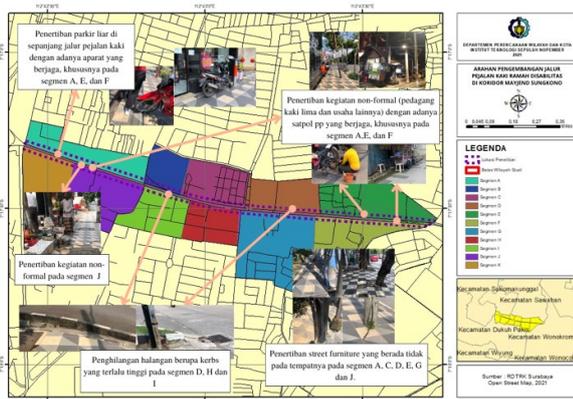
Dari Gambar 4 terdapat ketidakkonsistenan sebesar 0.01 karena *consistency ratio* (CR) ≤ 0.1 , maka tidak perlu dilakukan peninjauan ulang dan hasil pembobotan dapat diterima [10-11].

D. Arahan Pengembangan Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono

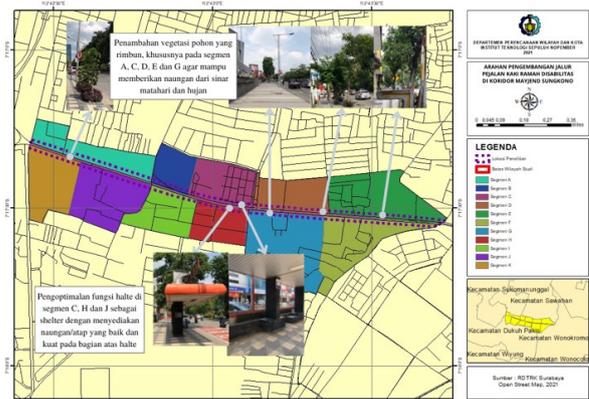
Untuk melahirkan arahan pengembangan jalur pejalan kaki ramah disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono, dilakukan analisis dengan pendekatan triangulasi data/sumber, dimana penulis mengolaborasikan sumber-sumber yang didapat sehingga dapat mensintesis arahan pengembangan yang relevan. Sumber yang digunakan untuk proses triangulasi adalah hasil analisis sebelumnya berupa variabel prioritas pengembangan, hasil survei primer dan sekunder yang menjadi gambaran umum dari masing-masing segmen, pendapat pakar yang didapatkan melalui wawancara, dan literatur atau *best practice* dari jalur pejalan kaki ramah disabilitas. Arahan yang dihasilkan merupakan arahan dari masing-masing segmen yang ada di jalur pejalan kaki Koridor Mayjend Sungkono berdasarkan urutan prioritas variabel sebagai berikut:

- 1) *Variabel Ukuran Dasar Ruang*
Variabel ini ditunjukkan dengan Gambar 5.
- 2) *Variabel Konflik Pejalan Kaki*.
Variabel konflik pejalan kaki digambarkan dengan Gambar 6.

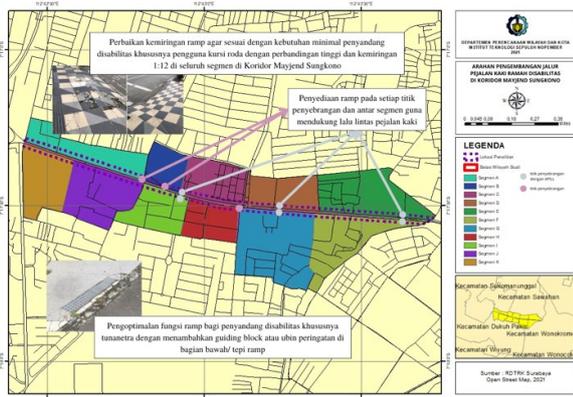
- 3) *Variabel Tekstur dan Permukaan*
Variabel tekstur permukaan dapat dilihat pada Gambar 7.
- 4) *Variabel Kebersihan*
Variabel kebersihan jalur pejalan kaki ramah disabilitas ditunjukkan pada Gambar 8.
- 5) *Variabel Jalur Pemandu*
Variabel jalur pemandu dapat dilihat pada Gambar 9.
- 6) *Variabel Convenience*
Arahan pengembangan variabel *convenience* ditunjukkan oleh Gambar 10.
- 7) *Variabel Ramp*
Arahan pengembangan variabel ramp jalur pejalan kaki ramah disabilitas dapat dilihat pada Gambar 11.



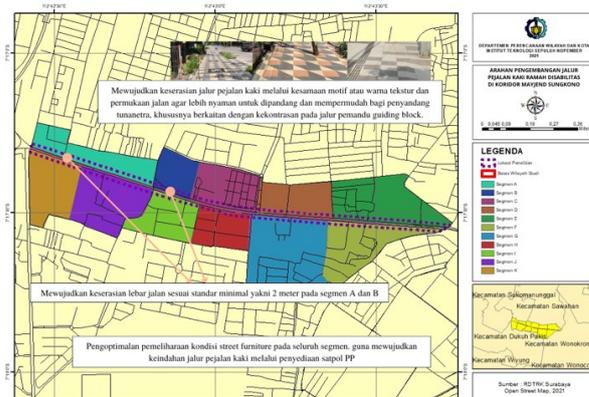
Gambar 10. Arahan Pengembangan Variabel *Convenience* Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 12. Arahan Pengembangan Variabel *Gaya Alam dan Iklim* Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 11. Arahan Pengembangan Variabel *Ramp* Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 13. Arahan Pengembangan Variabel *Keindahan* Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.

8) *Variabel Gaya Alam dan Iklim*

Variabel gaya alam dan iklim ditunjukkan Gambar 12.

9) *Variabel Partisipasi Masyarakat*

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan jalur pejalan kaki di Koridor Mayjend Sungkono masih belum ada. Hal yang dapat diupayakan adalah mengunjungi lembaga disabilitas untuk wawancara (diskusi), mengundang organisasi ke pemerintahan dan/ berkampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan untuk pembangunan kota [12-, 13]. Hal ini perlu dilakukan sebelum, saat proyek dilakukan dan sesudahnya. Namun, apabila tidak dapat mengundang masyarakat, maka pembangunan harus sesuai dengan standar teknis atau peraturan yang telah ada.

Arahan pengembangan yang terbentuk adalah pelibatan penyandang disabilitas. Selain itu komunitas, organisasi, LSM penyandang disabilitas dari mulai perencanaan pembangunan hingga pengawasan pembangunan pada pengembangan jalur pejalan kaki Koridor Mayjend Sungkono yang ramah disabilitas.

10) *Variabel Keindahan*

Arahan pengembangan variabel keindahan ditunjukkan oleh Gambar 13.

11) *Variabel Penerangan Jalan*

Variabel penerangan jalan dapat dilihat pada Gambar 14.

12) *Variabel Tangga*

Tangga pada jalur pejalan kaki tidak tersedia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penyediaan tangga perlu mempertimbangkan ukuran yang mumpuni [14-15]. Sedangkan berdasarkan pendapat pakar, penggunaan tangga bagi penyandang disabilitas dianggap tidak efektif dan efisien, sehingga apabila memungkinkan perbedaan ketinggian jalur pejalan kaki dan jalan raya dapat dihubungkan dengan ramp. Berdasarkan kondisi eksisting, jalur pejalan kaki tidak memiliki perbedaan level yang terlalu tinggi, sehingga penggunaan tangga tidak disarankan. Arahan pengembangan yang terbentuk adalah meminimalisir penyediaan tangga pada seluruh segmen di Koridor Mayjend Sungkono.

13) *Variabel Tingkat Kebisingan*

Bentuk arahan variabel tingkat kebisingan terdapat pada Gambar 15.

14) *Variabel Vegetasi*

Variabel vegetasi jalur pejalan kaki disabilitas ditunjukkan oleh Gambar 16.

15) *Variabel Resting Area*

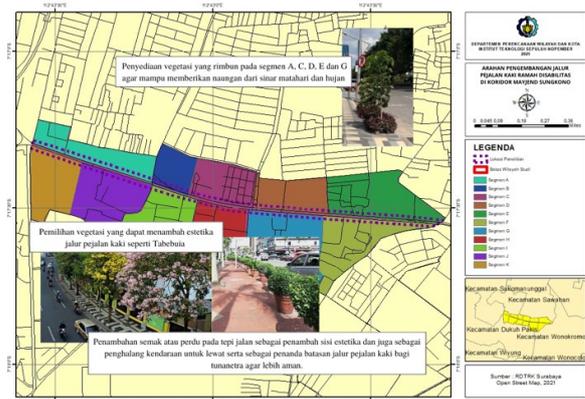
Arahan pengembangan variabel *resting area* terdapat pada Gambar 17.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

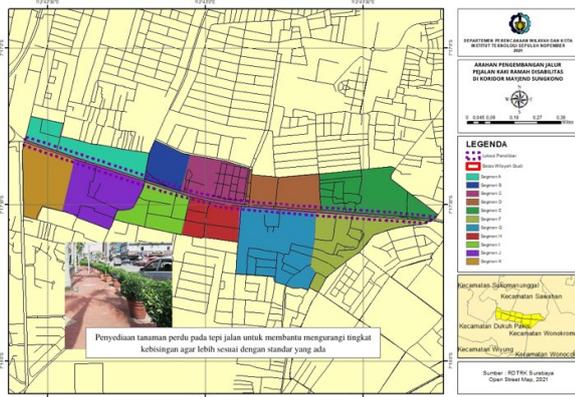
Jalur Pejalan Kaki di Koridor Mayjend Sungkono pada kenyataannya belum memenuhi parameter variabel jalur pejalan kaki ramah disabilitas, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya survey pada 11 segmen.



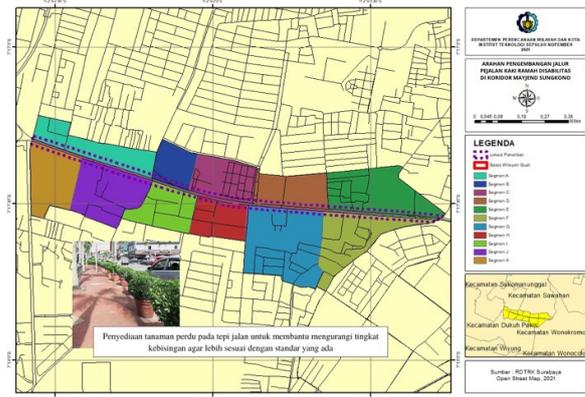
Gambar 14. Arahan Pengembangan Variabel Penerangan Jalan Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 16. Arahan Pengembangan Variabel Vegetasi Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 15. Arahan Pengembangan Variabel Tingkat Kebisingan Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.



Gambar 17. Arahan Pengembangan Variabel Resting Area Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabilitas di Koridor Mayjend Sungkono.

Lokasi survey yaitu di Koridor Mayjend Sungkono. Berdasarkan preferensi penyandang disabilitas di Kota Surabaya, terdapat skala prioritas pengembangan dari sebuah jalur pejalan kaki agar dapat menunjang hak mereka.

Skala prioritas pengembangan tersebut yakni, 1) Ukuran dasar ruang, 2) konflik pejalan kaki, 3) tekstur dan permukaan, 4) Kebersihan, 5) Jalur Pemandu, 6) *convenience*, 7) ramp, 8) gaya alam dan iklim, 9) partisipasi masyarakat, 10) keindahan, 11) penerangan jalan, 12) tangga, 13) tingkat kebisingan, (14) vegetasi dan 15) *resting area*. Dengan adanya skala prioritas tersebut, dan adanya gambaran kondisi eksisting, *best practice*/literatur serta hasil wawancara terhadap pakar, kemudian dapat dibentuk arahan pengembangan jalur pejalan kaki ramah disabilitas di Kota Surabaya, khususnya pada studi kasus di Koridor Mayjend Sungkono.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Hasil penelitian dapat dijadikan masukan atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengembangan jalur pejalan kaki ramah disabilitas di Kota Surabaya khususnya di Koridor Mayjend Sungkono sesuai dengan preferensi variabel prioritas masyarakat penyandang disabilitas. 2) Pada penelitian selanjutnya, dapat diperdalam dengan menambahkan jumlah responden penyandang disabilitas sehingga dapat didapatkan *insight* yang lebih menyeluruh di Kota Surabaya terkait kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas dalam pengembangan jalur pejalan kaki ramah disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Shirvani, *The urban design process*. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1985.
- [2] K. Iveson, "Social or spatial justice? Marcuse and Soja on the right to the city," *City*, vol. 15, no. 2, pp. 250–259, 2011.
- [3] I. L. Organization, *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization, 2013.
- [4] N. Tanan, *Fasilitas Pejalan Kaki*. Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.
- [5] E. H. Ma'rif, M. F., Prabawati, I., Fanida, "Revitalization of pedestrian: Fulfillment accessibility rights for persons with disabilities (PWDs) in Surabaya," *1st Int. Conf. Soc. Sci. (ICSS 2018)*, vol. 226, pp. 187–192, 2018, doi: <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.40>.
- [6] S. H. Ginting, P., Situmorang, *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*, 1st ed. Medan: Medan USU Press, 2008.
- [7] O. R. M. H. G. Mulia, "Penentuan prioritas indikator dalam merencanakan jalur pejalan kaki (Studi kasus: Kawasan Blok M, Jakarta Selatan)," *J. Pembang. Wil. dan Kota*, vol. 14, no. 3, pp. 175–185, 2011.
- [8] S. A. Irafany, "Indeks Kenyamanan Jalur Pedestrian Berbasis Kebutuhan Pejalan Kaki di Kota Makassar," Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- [9] K. P. R. Indonesia, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang : Baku Tingkat Kebisingan*. Jakarta: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 1996.
- [10] T. L. Saaty, *Group Decision Making and The AHP in The Analytic Hierarchy Process*. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 1989.
- [11] A. Baric, D., Dzambo, "An application of the AHP method for evaluation of level crossing design in a congested urban area: Case study Lc Sokolska in Zagreb, Croatia," *Transp. Probl. an Int. Sci. J.*, vol. 16, no. 4, pp. 96–97, 2021.
- [12] N. K. Mushule, "Universal design of transportation systems: A case study of access and mobility of people with disabilities at selected intersections in Dar Es Salaam," *Tanzania J. Eng. Technol.*, vol. 33, no. 2, pp. 52–57, 2010.
- [13] R. Basha, "Disability and public space—case studies of Prishtina and Prizren," *Int. J. Contemp. Archit.*, vol. 2, no. 3, pp. 63–65,

2015.

- [14] H. A. K. Lubis, "Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka," Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2008.
- [15] J. Berrett, B., Leake, G.R., May, A.D., Whelan, *No Title*. New York: White Rose Consortium ePrints Repository, 1988.